



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Januari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HANIAH
2. Jabatan : HAKIM
3. NHK : 59437

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.157.000.000

1. Tanah Seluas 4516 m2 di SINJAI, HASIL SENDIRI Rp. 157.000.000
2. Tanah Seluas 5508 m2 di MAMUJU UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 253 m2/144 m2 di KOTA MAKASSAR , HIBAH DENGAN AKTA Rp. 1.000.000.000
4. Tanah Seluas 240 m2 di TAKALAR, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 214 m2/70 m2 di GOWA, HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000
6. Tanah Seluas 1990 m2 di GOWA, HASIL SENDIRI Rp. 95.000.000
7. Tanah Seluas 1891 m2 di TAKALAR, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 181.000.000

1. MOBIL, TOYOTA RUSH Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000
2. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
3. MOTOR, YAMAHA FINO Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 17.000.000
4. MOTOR, YAMAHA NMAX Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 26.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ---

D. SURAT BERHARGA Rp. ---



E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	7.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	2.345.000.000
III. HUTANG	Rp.	146.200.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.198.800.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



Komisi Pemberantasan Korupsi

**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

**TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

Atas Nama : HANIAH
NIK : 7303015204660002
Lembaga : MAHKAMAH AGUNG
Unit Kerja : PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR
Sub Unit Kerja : PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA
Jabatan : HAKIM
Jenis Laporan : Periodik - 2020
Tanggal Kirim : 21 Januari 2021

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.